

## **Peran Pemerintah Kota Solok dalam Pengurusan Izin Berusaha : (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Solok)**

**Hilma Lathifah<sup>1</sup>, Fachri Adnan<sup>2</sup>, Afriva Khaidir<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri  
Padang

e-mail: [hilmalathifah23@gmail.com](mailto:hilmalathifah23@gmail.com) [fachri.adnan@gmail.com](mailto:fachri.adnan@gmail.com)  
[af.khaidir@fis.unp.ac.id](mailto:af.khaidir@fis.unp.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini menginvestigasi konsep, karakteristik, dan peran birokrasi dalam pengurusan surat izin usaha, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas fenomena birokrasi dan pengalaman pengusaha, sementara metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci proses administratif tanpa melakukan manipulasi variabel. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang beragam tantangan yang muncul dalam pengurusan surat izin usaha, meliputi kompleksitas proses administratif, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pemohon izin, serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja birokrasi dalam melayani kebutuhan pengusaha. Dari pemahaman yang lebih mendalam ini, diharapkan penelitian ini mampu menyusun rekomendasi yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam administrasi publik, termasuk perbaikan dalam sistem pengelolaan dokumen, peningkatan pelatihan dan kapasitas pegawai birokrasi, serta penerapan teknologi informasi yang lebih luas untuk mendukung proses administratif yang lebih efisien dan transparan.

**Kata Kunci** : *Peran Pemerintah, Perizinan Usaha, DPM-PTSP*

### **Abstract**

This research investigates the concept, characteristics and role of bureaucracy in arranging business permits, using a qualitative approach and descriptive methods. A qualitative approach allows an in-depth understanding of the complexity of bureaucratic phenomena and entrepreneurs' experiences, while descriptive methods are used to describe in detail administrative processes without manipulating variables. Data was collected through interviews, observations and document analysis, then analyzed qualitatively to identify emerging patterns and themes. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of the various challenges that arise in processing business permits, including the complexity of the administrative process, the obstacles faced by permit applicants, as well as the factors that influence the performance of the bureaucracy in serving the needs of entrepreneurs. From this deeper understanding, it is hoped that this research will be able to develop holistic and sustainable recommendations to improve bureaucratic efficiency in public administration, including improvements in document management systems, increasing training and

capacity of bureaucratic employees, as well as wider application of information technology to support administrative processes. more efficient and transparent.

**Keywords** : *Government Role, Business Licensing, DPM-PTSP*

## **PENDAHULUAN**

Surat izin usaha menjadi salah satu aspek krusial dalam pengelolaan birokrasi dan perizinan usaha, karena memungkinkan individu atau perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di Indonesia, proses pengurusan surat izin usaha seringkali dihadapkan pada tantangan kompleks, yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis serta meningkatkan biaya operasional. Oleh karena itu, kajian tentang konsep birokrasi dan pengelolaan surat izin usaha menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses tersebut.

Pengurusan izin berusaha merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Izin berusaha yang efisien dan transparan sangat penting dalam menarik investasi, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, seringkali proses perizinan di tingkat pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk birokrasi yang rumit, lambatnya proses, dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Dalam beberapa tahun terakhir, proses pengurusan izin usaha di Indonesia telah menjadi sorotan utama karena adanya masalah birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota Solok pun tidak luput dari tantangan ini, dan evaluasi terhadap peran DPM-PTSP Kota Solok menjadi relevan untuk mengevaluasi keefektifan upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha.

Adanya tantangan tersebut dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, serta menimbulkan ketidakpastian bagi para pengusaha dan investor. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengurusan izin berusaha di tingkat pemerintah daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah adalah pendirian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan pelayanan yang terintegrasi kepada para pelaku usaha.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan bisnis. Dengan demikian, evaluasi terhadap peran DPM-PTSP Kota Solok dalam pengurusan izin berusaha menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha dan mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di pasar.

Konsep birokrasi dan pengurusan surat izin usaha, beberapa aspek menjadi fokus utama. Pertama, adalah pemahaman mendalam terhadap struktur dan karakteristik birokrasi dalam konteks administrasi publik, termasuk prosedur-prosedur yang terlibat dalam pengurusan surat izin usaha. Kedua, adalah analisis terhadap peran birokrasi dalam mengatur dan mengawasi aktivitas usaha, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Ketiga, adalah penelusuran terhadap faktor-faktor penyebab rumitnya proses pengurusan surat izin usaha di Indonesia, termasuk peraturan yang berbelit dan praktek-praktek birokratis yang berlebihan.

Birokrasi, sebagai sistem atau praktik pemerintahan yang terstruktur, memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi suatu negara. Namun demikian,

birokrasi yang tidak efisien dan terlalu rumit dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi best practices atau praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan birokrasi dan perizinan usaha dari negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi tantangan serupa. Dengan demikian, dapat diadopsi atau disesuaikan dengan kondisi lokal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengurusan surat izin usaha di Indonesia. Perlu memperhatikan aspek kebijakan yang mendukung reformasi birokrasi dan perizinan usaha, serta keterlibatan stakeholder-stakeholder terkait dalam proses tersebut.

Kota Solok, sebagai contoh, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berpotensi untuk mengembangkan sektor ekonominya melalui peningkatan investasi dan pengembangan bisnis. Namun, tantangan dalam pengurusan izin berusaha juga dirasakan di Kota Solok. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji peran Pemerintah Kota Solok, terutama melalui DPM-PTSP, dalam pengurusan izin berusaha menjadi relevan dan penting. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan perizinan berusaha di Kota Solok serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan di masa yang akan datang.

Selain itu, peran pemerintah kota dalam pengelolaan izin usaha juga berpotensi memengaruhi citra dan reputasi daerah sebagai destinasi investasi yang menarik. Apabila proses pengurusan izin usaha dianggap rumit, tidak transparan, atau rentan terhadap praktik korupsi, maka hal ini dapat menghambat investasi dan mengurangi kepercayaan investor terhadap kondisi bisnis di Kota Solok.

Fenomena yang kerap kali ditemukan dalam pelayanan perizinan, yaitu: Pertama, pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan perizinan terpadu. Kedua, waktu pengurusan surat izin yang berlarut-larut. Ketiga, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tidak mendukung dalam pelayanan perizinan. Salah satu jenis pelayanan perizinan, yaitu pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Evaluasi terhadap peran pemerintah kota dalam pengurusan izin berusaha menjadi suatu kebutuhan penting untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelayanan kepada para pelaku usaha. Studi kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Solok menjadi fokus penelitian ini karena lembaga ini bertanggung jawab langsung dalam pemberian izin usaha di tingkat lokal. Dengan memperhatikan pentingnya evaluasi terhadap peran pemerintah kota dalam pengurusan izin berusaha, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja DPM-PTSP Kota Solok serta mengevaluasi sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kemudahan berusaha di wilayah tersebut. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah kota dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada para pelaku usaha.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep, karakteristik, dan peran birokrasi dalam pengurusan surat izin usaha, dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman konteks. Metode deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan secara detail fenomena yang diamati, baik itu proses birokrasi maupun pengalaman pengusaha dalam mengurus surat izin usaha, tanpa melakukan manipulasi variabel atau menggali hubungan kausal. Pendekatan ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif

tentang situasi yang diamati. Selanjutnya, data akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik-teknik seperti pengkodean tematik dan penyusunan narasi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dari data tersebut. Hasil analisis akan digunakan untuk menyusun temuan dan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan perbaikan pengelolaan birokrasi dalam pengurusan surat izin usaha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Konsep Birokrasi dalam Pengurusan Surat Izin Usaha**

Konsep birokrasi dalam teori seringkali didefinisikan sebagai sistem administrasi yang terstruktur dan terorganisir, dengan hirarki yang jelas serta prosedur yang ditetapkan untuk mengatur proses administratif. Namun, dalam praktiknya, terdapat serangkaian tantangan yang membuat konsep ini sulit diterapkan dengan sempurna dalam pengurusan surat izin usaha. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas regulasi dan prosedur administratif yang sering kali membingungkan dan memperlambat proses pengajuan izin. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dari teori birokrasi dan realitas lapangan yang dihadapi oleh pemohon izin usaha.

Selain itu, kesenjangan antara teori dan praktik juga dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman dan kompetensi di antara petugas administrasi yang bertanggung jawab atas pengurusan izin usaha. Terkadang, petugas administrasi tidak sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku atau tidak terlatih dalam menerapkan prosedur administrasi dengan benar, yang dapat menghasilkan ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dari teori birokrasi dan kenyataan lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas administrasi agar dapat mengurangi kesenjangan tersebut.

#### **Karakteristik Birokrasi dan Pengaruhnya terhadap Efisiensi Administratif dalam Pengurusan Surat Izin Usaha**

Karakteristik birokrasi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan efisiensi administratif dalam pengurusan surat izin usaha. Pertama, rigiditas hierarki yang sering ditemukan dalam struktur birokrasi dapat menghambat aliran informasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Proses yang harus melalui banyak tingkatan hierarki sering kali memperlambat respons terhadap permintaan izin usaha. Selain itu, prosedur-prosedur yang kompleks yang diperlukan oleh birokrasi dapat menambah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengurusan izin usaha. Misalnya, persyaratan dokumentasi yang rumit atau prosedur validasi yang bertingkat dapat memperlambat proses pengajuan izin usaha.

Kedua, karakteristik birokrasi yang menekankan pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur standar juga dapat menghambat fleksibilitas dalam menanggapi perubahan atau situasi yang tidak terduga. Ketika terjadi perubahan kebutuhan atau kondisi pasar yang memerlukan penyesuaian cepat, birokrasi yang terlalu kaku mungkin tidak mampu memberikan respons yang tepat waktu. Ini dapat memperlambat proses pengurusan izin usaha dan menghambat kemampuan bisnis untuk bersaing dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengevaluasi ulang prosedur birokrasi yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Selanjutnya, karakteristik birokrasi yang cenderung memperlambat proses pengambilan keputusan juga dapat mempengaruhi efisiensi administratif dalam pengurusan surat izin usaha. Ketika pengambilan keputusan memerlukan persetujuan dari banyak pihak atau melalui banyak tahap evaluasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengajuan izin usaha dapat meningkat secara signifikan. Terlebih

lagi, ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dapat memunculkan ketidakpastian bagi pengusaha, yang dapat menghambat rencana investasi atau pengembangan bisnis yang lebih lanjut. Selain itu, karakteristik birokrasi yang memerlukan dokumentasi dan administrasi yang rumit juga dapat menambah beban kerja dan biaya bagi pemohon izin usaha.

### **Peran Birokrasi dalam Pengurusan Surat Izin Usaha dan Dampaknya terhadap Daya Saing Ekonomi**

Peran birokrasi dalam pengurusan surat izin usaha memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing ekonomi suatu negara. Penelitian menunjukkan bahwa proses pengurusan izin usaha yang lambat dan tidak responsif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menghambat aktivitas bisnis yang lancar dan berkelanjutan. Pengusaha yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam mendapatkan izin usaha cenderung menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi baru, yang pada akhirnya dapat merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, birokrasi yang efisien dan responsif mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi proses bisnis yang lebih mudah dan efisien.

Namun demikian, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa proses pengurusan surat izin usaha masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Birokrasi yang rumit, lambat, dan tidak transparan dapat menyulitkan pengusaha dalam memperoleh izin usaha yang diperlukan. Pengalaman yang buruk dalam proses pengurusan izin usaha tidak hanya meningkatkan biaya operasional bagi pengusaha, tetapi juga mengurangi daya saing suatu negara dalam kancah global. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pengurusan surat izin usaha menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tidak hanya itu, melibatkan para pemangku kepentingan seperti pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses reformasi birokrasi juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor ini dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran birokrasi dalam pengurusan surat izin usaha tidak hanya menjadi kunci untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara dalam skala global.

### **Pembahasan**

Faktor budaya organisasi juga dapat berperan dalam menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik birokrasi. Dalam beberapa kasus, budaya organisasi yang tidak responsif atau bahkan resisten terhadap perubahan dapat menyebabkan implementasi konsep birokrasi yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dapat menghambat kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan responsif. Oleh karena itu, reformasi budaya organisasi juga dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik birokrasi dalam pengurusan izin usaha.

Selain itu, peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga dapat menjadi faktor penentu dalam mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik birokrasi. Dengan adopsi sistem informasi yang canggih dan terintegrasi, proses pengurusan izin usaha dapat menjadi lebih efisien dan transparan. Sistem TIK yang tepat dapat membantu mengotomatisasi beberapa tahapan dalam proses pengurusan izin usaha, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi para pemohon.

izin. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik birokrasi.

Persyaratan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap dan terperinci serta menjalani proses verifikasi yang rumit dapat memerlukan sumber daya yang signifikan dari pihak pemohon, baik dalam hal waktu maupun uang. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pengusaha kecil atau menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga membatasi akses mereka terhadap izin usaha yang diperlukan untuk berkembang.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik birokrasi dan dampaknya terhadap efisiensi administratif dalam pengurusan surat izin usaha menjadi sangat penting. Evaluasi terhadap proses-proses birokrasi yang ada perlu dilakukan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan guna meningkatkan responsivitas, fleksibilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik, khususnya dalam hal pengurusan surat izin usaha.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan merampingkan proses birokrasi dan mengurangi hambatan administratif yang tidak perlu. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi solusi efektif dalam mempercepat proses pengurusan izin usaha serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam koordinasi antarinstansi terkait agar proses pengurusan izin usaha dapat dilakukan secara terintegrasi dan efisien.

Tidak hanya itu, melibatkan para pemangku kepentingan seperti pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses reformasi birokrasi juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor ini dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran birokrasi dalam pengurusan surat izin usaha tidak hanya menjadi kunci untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara dalam skala global.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran birokrasi dalam pengurusan surat izin usaha memiliki implikasi yang signifikan terhadap daya saing ekonomi suatu negara. Meskipun birokrasi yang efisien dan responsif mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi proses bisnis yang lancar, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti birokrasi yang rumit, lambat, dan kurang transparan. Reformasi birokrasi yang berfokus pada merampingkan proses, memanfaatkan teknologi informasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi administratif dalam pengurusan surat izin usaha.

Dengan melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi dan proses pengurusan izin usaha, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif dari pengusaha, akademisi, serta masyarakat sipil, upaya reformasi birokrasi dapat menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih mendukung bagi pengusaha, serta meningkatkan kontribusi sektor bisnis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar, and Muharika, *Metodologi Penelitian Evaluasi Program* (Bandung: Alfabeta: Bandung: Alfabeta, 2019)
- Anwar, K, and I. W Mala, „Dampak Pengembangan Kebijakan City Branding “Ngawi Ramah” Terhadap Realisasi Investasi Di Kabupaten Ngawi”, *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 6(2) (2023), 134-42
- Bevir, D, *Bureaucracy* (Buckingham: Open University Press: Buckingham: Open University Press, 2007)
- Bismakuncara, O, and I Inayati, „Evaluasi Program Izin Mendirikan Bangunan Dengan Jasa Arsitek Gratis Bagi Rumah Tinggal (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi DKI Jakarta)”, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2) (2019), 116-33
- Fajarwati, A, and U Rahmadilla, „Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle”, *Jurnal Dialog*, 7(1) (2022), 123-33
- Haning, M. T, „Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik”, *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1) (2018), 25-37
- Idris, A., „Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia”, *Jurnal Paradigma (Jp)*, 2(3) (2017), 352-57
- Ismail, Ismaniar, and Novayanti Sopia Rukmana, „Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kabupaten Sinjai.”, *Jurnal Administrasi Publik*, (16)1 (2020), 12-21
- Jannah, R, „Pengembangan Aplikasi Online Sigle Submission Untuk Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Di Dpmpptsp Kabupaten Pidie Berbasis Web Mobile. ”, *Sagita Academia Journal*, 1(1) (2023), 41-47
- Kadir, A, . „. Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. ”, *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 3(3) (2015), 40-54
- Mayasari, I, „Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3) (2019), 403
- Robby, U. B. I, and W Tarwini, „Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Bekasi”, *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2) (2019), 51-57
- Rosenbloom, D.H, and Robert S. Kravchuk., *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. (Boston: McGraw-Hill: Boston: McGraw-Hill, 2005)
- Sanjoyo, S, S Sapriani, A Setiawan, and S Suroyya, „Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi”, *Borneo Law Review*, 4(1) (2020), 64-78
- Sari, F. R, „Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Sebagai Upaya Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis” (Doctoral dissertation. Politeknik Negeri Bengkalis, 2021)
- Sitindjak, V, „Konsep Reformasi Birokrasi”, *Jurnal Inspirasi*, 8(2) (2017), 79-89
- Tompkins, Jonathan R., *Organization Theory and Public Management* (Belmont: Thomson Wadsworth: Belmont: Thomson Wadsworth, 2005)